

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi membawa perubahan yang pesat pada setiap aspek kehidupan, termasuk perekonomian dunia yang ditandai dengan tumbuhnya aktivitas bisnis berskala global yang berimbas pada batasan antar negara yang mulai berkurang. Perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan multinasional yang kegiatannya tidak berpusat pada satu negara. Hal ini yang menyebabkan perusahaan membagi proses produksinya dalam beberapa departemen produksi (Refgia, 2017).

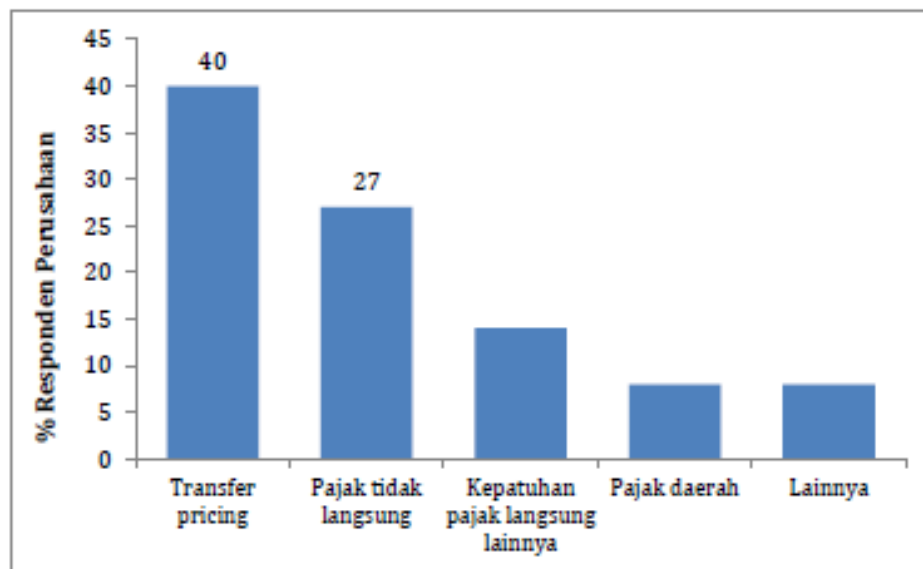
Tujuan dibentuknya perusahaan multinasional adalah untuk memperkuat aliansi strategis dan menumbuhkembangkan pangsa pasar ekspor dan impor diberbagai negara (Hidayat, Winarso, & Hendrawan, 2019). Perkembangan ini tidak lepas dari upaya mendapatkan keuntungan atau laba yang sebanyak-banyaknya. Hal inilah yang mendorong perusahaan multinasional menggunakan praktik yang dapat menambah keuntungan bagi mereka. Praktik yang biasa digunakan perusahaan multinasional salah satunya adalah praktik *transfer pricing*.

Praktik *transfer pricing* dimaksudkan oleh perusahaan multinasional untuk mengendalikan mekanisme arus sumber daya antar divisi perusahaan sebagai jalan keluar untuk penyesuaian keadaan lingkungan perekonomian internasional (Suandy, 2011). Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan regulasi antar perekonomian negara dan keadaan pasar internasional yang berubah-ubah, menuntut perusahaan agar dapat beradaptasi dengan faktor tersebut (Tiwa, Saerang, & Tirayoh, 2017).

Peraturan mengenai *transfer pricing* di Indonesia sudah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang paling awal memiliki ketentuan *transfer pricing* (Kristiaji, 2013, hlm. 22). Namun, regulasi di Indonesia tidak memberikan suatu panduan yang jelas. Secara umum, regulasi tersebut hanya mencantumkan tujuan serta hal-hal yang berkaitan dengan fungsi, aset, dan risiko yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis peran perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi dalam kerangka *value chain* grup perusahaan.

Survei yang diadakan oleh Ernst & Young 2011-2012 memberikan angka yang fantastis, dari 40% responden Wajib Pajak menyatakan bahwa *transfer pricing* menjadi isu utama dalam area risiko perpajakan, hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: *Transfer Pricing* (Kristiaji, 2013, hlm, 8)

Gambar 1. 1 Area Pajak yang Beresiko Bagi Perusahaan Tahun 2011-2012

Dalam era perekonomian yang telah mendunia ini, *transfer pricing* telah menjadi isu utama bagi otoritas pajak di berbagai negara. Hal ini dapat dilihat dengan diaturnya ketentuan *transfer pricing* di berbagai negara sekitar akhir tahun 2011 seperti Negara Meksiko pada Desember 1992 menandatangani kesepakatan NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) yang merupakan blok perdagangan trilateral antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang berujung pada sumber penggunaan dana ilegal dari upaya memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan antar negara dengan skema *transfer pricing*. Selanjutnya di Ghana memanfaatkan skema *transfer pricing* untuk praktik penghindaran pajak dengan

memanipulasi pembayaran royalti, pembayaran jasa manajemen, pembelian produk dari manufaktur afiliasi yang berfungsi sebagai pencatatan dan penagihan, serta peminjaman dana dalam jumlah besar. Untuk negara di Asia seperti China memanfaatkan skema manipulasi *transfer pricing* dengan cara membukukan kerugian penanaman modal asing untuk investasi perusahaan multinasional (Darussalam, Septriadi, & Kristiaji, 2013).

Uraian mengenai kondisi dari ketiga negara tersebut hanyalah gambaran besar mengenai persoalan manipulasi *transfer pricing* dalam transaksi lintas yurisdiksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk mengikis penerimaan pajak disuatu negara (Darussalam, Septriadi, & Kristiaji, 2013, hlm. 7).

Pada umumnya, perusahaan melakukan *transfer pricing* dikarenakan suatu faktor antara lain, (1) untuk menghindari pembayaran pajak (Refgia, 2017), (2) melakukan *tunneling incentive* (Hidayat, Winarso, & Hendrawan, 2019), (3) adanya kepemilikan terkonsentrasi yang sebagian besar kepemilikan sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham dominan dibandingkan dengan yang lainnya (Tiwa, Saerang, & Tirayoh, 2017), (4) adanya sistem pemberian kompensasi bonus yang memberikan pengaruh terhadap kinerja manajemen (Wafiroh & Hapsari, 2015), (5) ukuran perusahaan yang memiliki total aktiva besar yang mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total asset yang kecil (Refgia, 2017), (6) memiliki reputasi *good corporate governace* yang baik (Sari & Puryandani, 2018), (7) tingkat risiko perusahaan yang diukur dengan membandingkan total hutang perusahaan dengan total ekuitas yang dimiliki (Pratiwi, 2018).

Indonesia merupakan tujuan menarik untuk penanaman investasi (Kristiaji, 2013, hlm. 127). Beberapa daya tarik Indonesia adalah pangsa pasar yang besar, stabilitas, upah buruh yang relatif rendah, dan ketersediaan bahan baku pendukung. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu penghasil komoditas utama di dunia. Hingga saat ini, ekspor barang non-migas utama dari Indonesia juga masih banyak memiliki kaitan dengan barang komoditas seperti bahan tambang, besi, tembaga,

dan karet ataupun olahan komoditas yang masih setengah jadi, seperti lemak dan minyak nabati dari kelapa sawit.

Penelitian yang dilakukan fokus pada perusahaan sektor pertambangan karena terindikasi sering melakukan penghindaran pajak dengan metode *transfer pricing* (Suparno, 2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2019), mengatakan bahwa dengan melakukan *transfer pricing*, perusahaan pertambangan dapat menghindar dari besaran pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara, karena pendapatannya yang rendah sebagai hasil nilai transaksi yang murah dengan perusahaan afiliasi

Tabel 1. 1 Kontribusi Sektoral Penerimaan Pajak Negara 2019

| No | Sektor | Kontribusi terhadap Penerimaan Pajak | |
|----|----------------------------|--------------------------------------|-------|
| 1. | Industri Pengolahan | Rp 187,72 T | 28,7% |
| 2. | Perdagangan | Rp 135,67 T | 20,8% |
| 3. | Jasa Keuangan | Rp 95,26 T | 14,6% |
| 4. | Konstruksi & Real Estate | Rp 42,13 T | 6,5% |
| 5. | Pertambangan | Rp 37,23 T | 5,7% |
| 6. | Transportasi & Pergudangan | Rp 28,17 T | 4,3% |
| | TOTAL | Rp 526,18 T | 80,6% |

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019

Data yang terlihat pada Tabel 1.1 menunjukkan sektor pertambangan termasuk kedalam sektor unggulan yang berkontribusi terhadap PDB dan penerimaan pajak negara. Walaupun masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan besarnya potensi sektor unggulan lainnya.

Industri pertambangan merupakan industri yang pada dasarnya pengeksploitasi hasil bumi yang kemudian diolah untuk memperoleh nilai, kemudian dijual untuk memperoleh laba yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Perusahaan pertambangan cenderung diminati oleh para investor untuk mendirikan perusahaan guna pengambilan aset negara (Hidayat, Winarso, & Hendrawan, 2019). Mengingat sektor pertambangan merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat memberikan kontribusi pajak yang besar, maka praktik penghindaran pajak dengan metode *transfer pricing* ini sangat merugikan negara.

Dimuat dalam koran *Bisnis Indonesia* pada 30 Juli 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan praktik korupsi yang marak dalam pengelolaan sumber daya alam telah mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan

negara. Di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) misalnya, KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun pertahun. KPK berkeyakinan ada potensi penggelapan penerimaan negara yang dilakukan perusahaan dengan modus adanya ketidaksesuaian antara HGU dengan produksinya (*Bisnis Indonesia*, dikutip tanggal 21 Februari 2020). Berikut merupakan tabel yang menunjukkan beberapa temuan perusahaan sector pertambangan yang terindikasi melakukan *transfer pricing*.

Tabel 1. 2 Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terindikasi Melakukan *Transfer Pricing*

| No | Perusahaan | Temuan |
|----|------------------------------|--|
| 1. | PT Adaro Energy Tbk | Global Witness mengatakan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade di Singapura meningkat rata-rata tahunan dari US\$4 juta sebelum 2009 menjadi US\$55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70% batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia. Laporan tersebut juga menyebutkan, pada tahun 2008, Adaro membayar US\$33 juta untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia atas aturan sebelumnya dengan Coaltrade (merdeka.com, dikutip tanggal 21 Februari 2020). |
| 2. | PT Multi Sarana Avindo (MSA) | Didasarkan pada kecurigaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas tidak seimbangannya pajak yang dibayarkan dengan besarnya produksi tambang yang dimiliki oleh PT MSA. Selain itu, PT MSA juga melakukan pemindahan kuasa pertambangan sehingga menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan. Selanjutnya, DJP menggugat PT MSA sebesar Rp 7,7 miliar pada tahun 2007, 2009, dan 2010 atas dugaan penghindaran pajak yang pada akhirnya dimenangkan oleh PT MSA karena pengadilan tidak dapat membuktikan adanya |

| | | |
|--|--|--|
| | | pelanggaran peraturan perundang-undangan pajak oleh PT MSA (katadata.co.id, dikutip tanggal 1 Maret 2020). |
|--|--|--|

Sumber : merdeka.com; katadata.co.id (data diolah)

Mendengar kata pajak, banyak kalangan yang menganggapnya sebagai beban oleh wajib pajak karena dapat mengurangi pendapatan atau keuntungan yang diterima (Suparno, 2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiwa, Saerang, & Tirayoh (2017) bahwa pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap praktik *transfer pricing* yang ditunjukkan dengan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi tolak ukur keinginan manajemen untuk menerapkan praktik *transfer pricing* dalam menekan jumlah laba. Tetapi, lain hal dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosa, Andini, & Raharjo (2017) yang menyebutkan pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dimana kenaikan pajak justru akan menurunkan nilai *transfer pricing*.

Adanya perusahaan multinasional memunculkan kepemilikan saham yang akan terkonsentrasi pada salah satu pihak. Pihak tersebut akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada di bawah kendalanya. Dengan kepemilikan yang terkonsentrasi pada satu pihak tersebut menimbulkan kesempatan bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan kegiatan *tunneling* (Hidayat, Winarso, & Hendrawan, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, Winarso, & Hendrawan (2019), menyebutkan salah satu bentuk *tunneling* adalah peran pemegang saham pengendali dalam memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa dan berpengaruh secara positif terhadap *transfer pricing*. Dengan diadakannya *tunneling* oleh pemegang saham pengendali, maka diindikasikan pemegang saham pengendali tidak melakukan pembayaran dividen sehingga pemegang saham minoritas merasa dirugikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosa, Andini, & Raharjo (2017) bahwa setiap kenaikan dari *tunneling incentive* akan membuat *transfer pricing* mengalami penurunan.

Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah kepemilikan asing. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) semakin besar kepemilikan saham asing, maka

kendali atas pengelolaan perusahaan semakin besar. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih secara langsung maupun tidak langsung, sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Tetapi, dalam penelitian yang dilakukan oleh Tiwa, Saerang, & Tirayoh (2017) menunjukkan kepemilikan asing tidak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* yang memiliki arti bahwa presentasi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan bukan menjadi suatu tolak ukur dalam keinginan perusahaan menerapkan *transfer pricing*.

Tata kelola perusahaan juga mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham memiliki suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan akurat. Salah satu bentuk monitoring yang dilakukan adalah transparansi pemegang saham dalam hal pajak (Eksandy, 2017). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosa, Andini, & Raharjo (2017) kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap indikasi perusahaan yang melakukan *transfer pricing*, lain hal dengan penelitian yang dilakukan oleh F, Mayowan, & Karjo (2016) yang menyebutkan perusahaan tidak mempertimbangkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai dasar penentuan kegiatan *transfer pricing*.

Penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal maupun ilegal (Lutfia & Pratomo, 2018). Dikatan ilegal (*tax evasion*) apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak. Dikatan secara legal (*tax avoidance*) apabila transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menganggap penelitian ini perlu dilakukan kembali melihat perbedaan hasil penelitian sebelumnya dengan fokus pada faktor *tax aggressiveness*, *tunneling incentive*, kepemilikan asing, dan kualitas audit. Beritik tolak dari hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *tax aggressiveness* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengaruh *tax aggressiveness* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
2. Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
3. Pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
4. Pengaruh kualitas audit terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam hal perpajakan, khususnya permasalahan mengenai *transfer pricing* di Indonesia, dan menjadi bahan referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi Direktorat Jenderal Pajak mengenai faktor yang mempengaruhi aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan khususnya sektor pertambangan dalam membuat kebijakan perpajakan di masa depan agar peraturan perpajakan dapat lebih sempurna.

